

**ANALISIS DAMPAK *PARLIAMENTARY THRESHOLD* TERHADAP  
DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II PADA PEMILIHAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019**

**RANDY DAVRIAN IMANSYAH**

**ABSTRAK**

Daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang meliputi wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Luar Negeri pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2019 memiliki permasalahan keterwakilan politik. Terdapat suara tidak terkonversi akibat penerapan sistem *Parliamentary Threshold*. Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai implementasi sistem Pemilu Proporsional yang diterapkan pada Pemilihan Anggota DPR RI tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori sistem pemilu dan teori keterwakilan politik.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan melakukan wawancara, bahan dokumentasi, dan studi pustaka. Penulis menggunakan empat tahapan analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi dengan triangulasi data.

Hasil akhir penelitian ini menunjukkan terdapat suara tidak terkonversi yang tinggi. Akibatnya, menimbulkan permasalahan keterwakilan politik yang disebabkan partai politik dan calon anggota DPR RI yang memiliki suara tinggi dan dapat mendapatkan kursi untuk mewakili dapil DKI Jakarta II apabila suaranya dikonversi menjadi kursi tanpa *Parliamentary Threshold*, namun karena suara dikonversi dengan *Parliamentary Threshold* maka terdapat partai politik dan calon anggota DPR RI yang tidak diikuti. Dampaknya, terdapat kepentingan politik yang dibutuhkan untuk diwakilkan namun

tidak terakomodir, hal itu dibuktikan dengan perolehan suara yang tinggi menjadi tidak terwakilkan.

**Kata Kunci:** Parliamenary *threshold*, suara tidak terkonversi, permasalahan keterwakilan politik, sistem pemilu proposional, perolehan suara.

**ANALYSIS OF THE IMPACT OF PARLIAMENTARY THRESHOLD ON  
THE ELECTORAL DISTRICT OF DKI JAKARTA II IN THE 2019  
ELECTION OF MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**RANDY DAVRIAN IMANSYAH**

**ABSTRACT**

The Electoral District of DKI Jakarta II which includes the South Jakarta Administrative City, Central Jakarta Administrative City, and Overseas in the 2019 Election of Members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia has political representation problems. Because there are votes that are not converted due to the implementation of the Parliamentary Threshold system. This is contrary to the values of implementing the Proportional Election system which was applied to the Election of Members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in 2019. This study uses the theory of the electoral system and the theory of political representation.

The method used is descriptive qualitative using primary data sources and secondary data. The sampling technique was carried out by conducting interviews, documentation materials, and literature studies. The author uses four stages of data analysis according to Miles & Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal/verification by data triangulation.

The final result of this study shows that there are high unconverted electoral votes. As a result, it creates political representation problems caused by political parties and candidates for members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia who have high votes and can get seats to represent the Electoral District of DKI Jakarta II if their votes are converted to seats without a Parliamentary Threshold, but because the votes are converted to the Parliamentary Threshold then there are political parties

and candidates for members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia that are not included. As a result, there are political interests that need to be represented but are not accommodated, this is evidenced by the high number of votes that are not represented.

**Keywords:** Parliamentary threshold, unconverted votes, political representation problems, proportional election sistem, vote acquisition.